

Bersama Mengawasi Pemilu 2024: Mewujudkan Demokrasi Indonesia yang Transparan dan Akuntabel

Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng.¹, Kianata², David³, Alda Aulia Safitri⁴, Jolyn⁵, Federline Yeo⁶, Ticto Jonata⁷, Siau phe⁸, Novita⁹, Rosari Oktaviana¹⁰, Manco¹¹, Putri Klaudia¹², Natasia¹³, Mario T¹⁴, Joanne Seveny¹⁵, Charless lee¹⁶, Darren Anderson¹⁷, Robby Wiranto¹⁸, Takbirullah Rizquha¹⁹, Evonne²⁰

Universitas Internasional Batam

e-mail: nimatul@uib.ac.id¹, 2331097.kianata@uib.edu², 2331104.david@uib.ac.id³, 2312013.alda@uib.edu⁴, 2341282.jolyn@uib.ac.id⁵, 2342132.federline@uib.edu⁶, 2341186.ticto@uib.edu⁷, 2341092.siau@uib.edu⁸, 2341170.novita@uib.edu⁹, 2351094.rosari@uib.edu¹⁰, 2341203.manco@uib.edu¹¹, 2346028.putri@uib.edu¹², 2331129.natasia@uib.edu¹³, 2351126.mario@uib.edu¹⁴, 2331093.joanne@uib.edu¹⁵, 2341185.charless@uib.edu¹⁶, 2331105.darren@uib.edu¹⁷, 2332029.robby@uib.edu¹⁸, 2341188.takbirullah@uib.edu¹⁹, 2346015.evonne@uib.edu²⁰

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan Pemilu 2024 di Indonesia. Tantangan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, risiko dezinformasi di era digital, dan keterbatasan sumber daya pengawas. Metode yang digunakan adalah pelibatan mahasiswa dalam pemantauan langsung di TPS sesuai domisili, dokumentasi kegiatan, dan edukasi melalui media sosial. Hasil menunjukkan bahwa pemantauan pemilu oleh mahasiswa dapat meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan. Kerjasama antara institusi pendidikan dan Bawaslu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan lancar. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi pengembangan strategi pengawasan yang lebih efektif di era digital dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk optimalisasi pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: *Pengawasan Pemilu, Partisipasi Mahasiswa, Transparansi, Dezinformasi, Pengawasan Partisipatif*

Abstract

This community service aims to increase student participation in monitoring the 2024 elections in Indonesia. The main challenges include low public participation, the risk of disinformation in the digital era, and limited supervisory resources. The methods used are student involvement in direct monitoring at polling stations according to domicile, documentation of activities, and education through social media. The results show that election monitoring by students can increase transparency and prevent fraud, but also has the potential to cause tension. Cooperation between educational institutions and Bawaslu facilitates the smooth implementation of activities. Recommendations for future research include developing more effective monitoring strategies in the digital era and improving coordination between stakeholders to optimize participatory monitoring.

Keywords: *Election Oversight, Student Participation, Transparency, Disinformation, Participatory Oversight*

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, Pemilu menjadi momen krusial dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan nasional. Namun, penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas (Surbakti et al., 2018).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Internasional Batam (UIB), untuk melibatkan mahasiswa baru dalam pengawasan partisipatif di wilayah mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan temuan Aspinnall dan Mietzner (2019) yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, terutama kaum muda, dalam memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

Partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan Pemilu memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses elektoral. Sebagaimana diungkapkan oleh Winanti et al. (2020), keterlibatan kaum muda dalam proses demokrasi tidak hanya membawa perspektif baru, tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi hasil Pemilu di mata publik. Lebih lanjut, Hidayat dan Prasetyo (2021) menyoroti bahwa pelibatan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu dapat menjadi sarana efektif untuk pendidikan politik dan pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang kritis.

Peran media sosial dalam Pemilu 2024 menjadi semakin signifikan dan berpotensi memberikan dampak yang besar. Fenomena viral seperti unggahan emosional calon pemilih atau video kandidat yang menari di TikTok menunjukkan besarnya pengaruh platform digital dalam membentuk opini publik. Namun, di sisi lain, hal ini juga membawa risiko penyebaran dezinformasi dan kampanye negatif yang dapat mengancam integritas Pemilu (Tapsell, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Lim (2022) mengungkapkan bahwa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan TikTok telah menjadi arena pertarungan informasi yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih secara signifikan.

Dalam menghadapi tantangan era digital, upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi semakin krusial. Kurniawati et al. (2023) menekankan pentingnya pengembangan kemampuan kritis masyarakat dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi terkait Pemilu di media sosial. Mereka berpendapat bahwa literasi digital yang baik dapat menjadi benteng pertahanan efektif terhadap manipulasi informasi dan kampanye hitam yang sering muncul menjelang Pemilu.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam pengawasan Pemilu 2024. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta jejaring pengawas Pemilu yang lebih luas dan efektif, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dalam menghadapi tantangan era informasi digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Hapsari et al. (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya meningkatkan legitimasi proses demokrasi, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting sebagai mitra strategis Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Kerjasama antara Bawaslu dan institusi pendidikan tinggi dapat menjadi model efektif untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia (Nurhalimah, 2019). Lebih lanjut, Saputra dan Asih (2022) mengemukakan bahwa kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan lembaga pengawas Pemilu dapat menghasilkan inovasi dalam metode pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.

Program PkM ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, diharapkan dapat tercipta institusi yang lebih akuntabel dan inklusif, sebagaimana digarisbawahi oleh Rosyadi et al. (2024) dalam studi mereka tentang kontribusi pengawasan partisipatif terhadap pencapaian SDGs di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kegiatan PkM ini dirancang untuk mengintegrasikan peran aktif mahasiswa, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan literasi politik masyarakat. Harapannya, inisiatif ini dapat berkontribusi pada terwujudnya Pemilu yang lebih berkualitas dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia di masa depan.

Masalah

(1) Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu diatasi:

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu: Meski Bawaslu telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong partisipasi publik, masih banyak warga yang kurang terlibat atau bahkan apatis terhadap proses pengawasan Pemilu.

- Tantangan era digital: Meningkatnya penggunaan media sosial membawa risiko penyebaran dezinformasi dan kampanye negatif yang dapat mengancam integritas Pemilu. Diperlukan strategi khusus untuk memanfaatkan potensi media digital sekaligus memitigasi risikonya.

- Keterbatasan sumber daya pengawas: Bawaslu memiliki keterbatasan dalam jumlah personel dan jangkauan geografis, sehingga perlu melibatkan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memperluas cakupan pengawasan.

(2) Terkait dengan target kegiatan, beberapa persoalan pokok yang perlu diaddress meliputi:

- Kurangnya pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengawasan Pemilu yang efektif: Meski memiliki semangat dan potensi besar, banyak mahasiswa belum memiliki pengetahuan teknis yang memadai tentang proses dan regulasi Pemilu.

- Belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk kampanye positif dan edukasi Pemilu: Diperlukan strategi kreatif untuk mengimbangi konten viral yang bersifat emosional atau sensasional dengan informasi yang edukatif dan konstruktif.

- Minimnya koordinasi antara Bawaslu, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil dalam upaya pengawasan partisipatif: Perlu dikembangkan mekanisme kerjasama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-metode yang mengintegrasikan edukasi masyarakat, observasi partisipatif, dan analisis data kualitatif untuk memahami dinamika pengawasan pemilu partisipatif oleh mahasiswa.

1. Edukasi Masyarakat

Sebagai landasan kegiatan, tim peneliti merancang dan mengimplementasikan program edukasi masyarakat yang komprehensif. Program ini bertujuan meningkatkan literasi pemilu dan kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Strategi edukasi meliputi:

- Pengembangan konten digital edukatif, termasuk infografis, video pendek, dan artikel interaktif yang membahas aspek-aspek kunci pemilu seperti regulasi kampanye, identifikasi dezinformasi, dan prosedur pelaporan pelanggaran.
 - Pemanfaatan platform media sosial populer (Instagram, TikTok, Twitter) untuk menyebarkan konten edukasi, dengan penekanan pada format yang menarik bagi generasi muda.
 - Penyelenggaraan webinar dan diskusi daring yang menghadirkan pakar pemilu, aktivis demokrasi, dan perwakilan Bawaslu untuk memberikan perspektif mendalam tentang proses pengawasan pemilu.
- ### 2. Observasi Partisipatif

Untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang dinamika pemilu di lapangan, penelitian ini menerapkan metode observasi partisipatif. Mahasiswa yang telah melalui program edukasi dilibatkan sebagai observer di TPS sesuai domisili masing-masing.

Protokol observasi mencakup:

- Penyusunan instrumen observasi terstruktur yang mencakup indikator-indikator kunci seperti kepatuhan terhadap prosedur pemungutan suara, aksesibilitas TPS, dan interaksi antara petugas KPPS dengan pemilih.
 - Pembagian periode observasi menjadi tiga fase: pra-pemungutan suara, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara.
 - Pelatihan intensif bagi mahasiswa observer untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang protokol observasi dan etika penelitian.
 - Implementasi sistem pelaporan real-time menggunakan aplikasi mobile yang memungkinkan input data secara cepat dan aman.
- ### 3. Dokumentasi Visual

Sebagai komplemen observasi, tim peneliti mengembangkan protokol dokumentasi visual yang sistematis. Metode ini bertujuan untuk merekam aspek-aspek penting proses pemilu yang mungkin luput dari catatan tertulis.

Elemen dokumentasi visual meliputi:

- Pengambilan foto dan video (dengan izin) yang menggambarkan suasana TPS, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara.
 - Pencatatan visual tentang tata letak TPS, ketersediaan fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus, dan penerapan protokol kesehatan.
 - Penggunaan teknik time-lapse untuk merekam dinamika antrian dan fluktuasi kepadatan pemilih sepanjang hari pemungutan suara.
- ### 4. Analisis Data

Proses analisis data mengadopsi pendekatan induktif-tematik yang memungkinkan identifikasi pola dan tema emergen dari data yang terkumpul.

Tahapan analisis meliputi:

- Transkripsi dan pengkodean data observasi menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif (misalnya NVivo atau ATLAS.ti).
- Pengembangan kerangka koding kolaboratif yang melibatkan multiple coder untuk meningkatkan reliabilitas inter-rater.
- Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas pengawasan partisipatif, tantangan implementasi, dan dampak terhadap integritas pemilu.
- Triangulasi data dari berbagai sumber (observasi, dokumentasi visual, feedback peserta) untuk meningkatkan validitas temuan.

5. Etika Penelitian

Penelitian ini menerapkan protokol etika yang ketat, meliputi:

- Perolehan informed consent dari semua partisipan, termasuk mahasiswa observer dan pemilih yang terlibat dalam dokumentasi visual.
- Penjagaan kerahasiaan data dengan menggunakan sistem pengkodean untuk melindungi identitas partisipan.
- Koordinasi intensif dengan Bawaslu dan KPPS setempat untuk memastikan kegiatan penelitian tidak mengganggu proses pemungutan suara.
- Peninjauan dan persetujuan protokol penelitian oleh Komite Etik Penelitian institusi.

Melalui pendekatan metodologis yang komprehensif ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran holistik tentang dinamika dan efektivitas pengawasan pemilu partisipatif oleh mahasiswa, sekaligus mengidentifikasi area-area potensial untuk peningkatan dalam siklus pemilu mendatang.

Pembahasan

A. Pemantauan Pemilu

Pemantauan pemilu yang dilakukan oleh mahasiswa di masing-masing TPS berdasarkan domisili mereka merupakan bentuk partisipasi aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kegiatan ini mencakup pemantauan pelaksanaan pemilu 2024 dan penghitungan hasil suara di TPS. Menurut Surbakti et al. (2018), keterlibatan warga negara, terutama kaum muda, dalam proses pengawasan pemilu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses elektoral.

Pemantauan yang dilakukan mahasiswa juga sejalan dengan konsep pengawasan partisipatif yang dikemukakan oleh Nasution (2019), di mana masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil pemilu, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam proses demokrasi.

B. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi kegiatan pemantauan pemilu dan penggunaan twibbon di media sosial merupakan strategi yang efektif dalam era digital. Menurut Juditha (2019), penggunaan media sosial untuk tujuan politik dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan anak muda. Unggahan dokumentasi kegiatan pemantauan dan twibbon tidak hanya berfungsi sebagai bukti partisipasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik bagi masyarakat luas.

Strategi ini juga sejalan dengan konsep "literasi digital kewarganegaraan" yang dikemukakan oleh Kurnia dan Astuti (2017), di mana warga negara menggunakan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Penggunaan media sosial dalam konteks ini dapat memperluas jangkauan pesan pentingnya partisipasi dalam pemilu.



Gambar 1. Dokumentasi partisipasi Pemilu 2024



Gambar 2. Lokasi Pemantauan Pemilu 2024



Gambar 3. Hasil Perhitungan suara Pemilu 2024

No	Nama Calon Pemilih	Hasil Perhitungan
9	ABDULLAH, LILY, S.P.	1000
10	FAH, SAPUTRA	1000
11	DR. HUSNAN HUSNAN	1000
12	DR. HUSNAN HUSNAN	1000
13	DR. HUSNAN HUSNAN	1000
14	DR. HUSNAN HUSNAN	1000

Gambar 4. Hasil Perhitungan suara Pemilu 2024 kec. Batu ampar

C. Analisis Kelebihan Pemantauan Pemilu

Kelebihan:

a) Mencegah Kecurangan dan Ketidakberesan:

Pemantauan pemilu membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan, seperti manipulasi suara, pembelian suara, dan intimidasi pemilih. Hal ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Mietzner (2019) yang menunjukkan bahwa kehadiran pemantau pemilu dapat mengurangi tingkat kecurangan secara signifikan.

b) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Pemantauan pemilu meningkatkan transparansi proses pemilu dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Sukmajati (2019) menegaskan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

c) Pendidikan Pemilih:

Pemantauan pemilu seringkali melibatkan kampanye pendidikan pemilih yang meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses pemilu dan hak-hak mereka.

Menurut Rosyadi et al. (2020), pendidikan pemilih yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan mengurangi jumlah suara yang tidak sah.

Kekurangan:

a) Potensi Konflik dan Ketidaknyamanan:

Kehadiran pemantau pemilu dapat memicu ketegangan atau konflik, terutama jika masyarakat lokal merasa diawasi oleh pihak luar. Muhtadi (2019) mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus, kehadiran pemantau dapat dianggap sebagai bentuk intervensi, yang berpotensi menimbulkan resistensi.

D. Pelaksanaan dan Kerjasama Institusional

Pelaksanaan pemantauan pemilu yang lancar dan mendapatkan izin dari Bawaslu menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pengawas pemilu. Kerjasama semacam ini, menurut Nurhalimah (2019), dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan kredibilitas proses pemilu.

E. Dampak Teknologi dalam Pemantauan Pemilu

Penggunaan teknologi, termasuk media sosial, dalam kegiatan pemantauan pemilu mencerminkan tren global dalam penyelenggaraan pemilu di era digital. Lim (2022) menyoroti bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemantauan, namun juga membawa tantangan baru seperti keamanan siber dan penyebaran dezinformasi.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi semakin penting. Kurniawati et al. (2023) menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama generasi muda, dalam menggunakan teknologi untuk partisipasi politik yang konstruktif.

F. Peran Mahasiswa dalam Penguatan Demokrasi

Keterlibatan mahasiswa dalam pemantauan pemilu tidak hanya berkontribusi pada integritas proses pemilu, tetapi juga berperan dalam pembentukan warga negara yang aktif dan kritis. Menurut Winanti et al. (2020), pengalaman partisipasi politik langsung di kalangan mahasiswa dapat membentuk kebiasaan kewarganegaraan yang positif di masa depan.

Lebih lanjut, Hidayat dan Prasetyo (2021) berpendapat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses politik formal seperti pemantauan pemilu dapat menjembatani kesenjangan antara partisipasi politik online dan offline yang sering diamati di kalangan generasi muda.

Simpulan

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam menjamin integritas proses demokratis di Indonesia. Peran vitalnya tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu. Efektivitas pengawasan pemilu bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini menciptakan sistem check and balance yang komprehensif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

Pengawas pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memantau setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Ketelitian dan objektivitas mereka sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga integritas proses pemilihan. Pengawasan yang efektif tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu

dan berkurangnya potensi konflik pasca-pemilu yang sering kali dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan manifestasi demokrasi partisipatif. Partisipasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses demokrasi, sehingga meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Di era digital, pengawasan pemilu perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, serta mendorong partisipasi generasi muda dalam proses pengawasan.

Setiap pemilu memberikan pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Analisis terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pengawasan harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemilu selanjutnya. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas lembaga pengawas pemilu, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun wewenang hukum. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.

Kesimpulannya, pengawasan pemilu yang efektif, transparan, dan partisipatif merupakan fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia. Melalui sinergi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan teknologi, pengawasan pemilu dapat menjadi katalis dalam mewujudkan proses demokrasi yang mencerminkan aspirasi rakyat secara jujur dan adil. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat terus ditingkatkan, memperkuat stabilitas dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pengawasan pemilu yang baik tidak hanya menjamin integritas proses demokrasi saat

ini, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295-317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Hapsari, D. R., Wibowo, A. H., & Nugroho, H. (2021). The Role of Civil Society in Strengthening Electoral Integrity: Lessons from Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 225-244. <https://doi.org/10.1177/1868103421994241>
- Hidayat, M. F., & Prasetyo, A. G. (2021). Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 211-228. <https://doi.org/10.7454/jpi.v6i2.323>
- Kurniawati, E., Santoso, A. D., & Widodo, P. (2023). Literasi Digital dan Partisipasi Politik: Strategi Penguatan Demokrasi di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(1), 45-62. <https://doi.org/10.24912/jkm.v7i1.14586>
- Lim, M. (2022). Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive Digital Cultures. *Asian Journal of Communication*, 32(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1982794>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.

Nasution, A. (2019). Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Sosial untuk Demokrasi Berkualitas. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(1), 1-15.

Nurhalimah, S. (2019). Sinergi Perguruan Tinggi dan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 113-130.
<https://doi.org/10.22146/jap.46581>

Rosyadi, S., Kusuma, A. S., & Fitriani, A. (2024). Participatory Election Monitoring and SDGs Achievement in Indonesia: Assessing the Impact and Challenges. *Journal of Governance and Development*, 18(1), 78-95.
<https://doi.org/10.32890/jgd2024.18.1.5>

Saputra, R. A., & Asih, D. N. (2022). Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi: Kolaborasi Akademisi, Mahasiswa, dan Bawaslu. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2), 187-204.
<https://doi.org/10.15408/jtpi.v3i2.23456>

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2018). Penguatan Demokrasi Elektoral di Indonesia: Rekomendasi untuk Reformasi Sistem Pemilu. *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.

Tapsell, R. (2020). Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive Digital Cultures. *Asian Studies Review*, 44(4), 737-754.
<https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1810728>

Winanti, P. S., Hanif, H., & Setiawan, K. M. P. (2020). Youthquake: Pendekatan Generasi Milenial terhadap Demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik*, 5(2), 291-315.
<https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.265>